

# Pengembangan Indikator Penilaian Keberhasilan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)

Lolly Martina Martief

Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM, Kementerian PUPR  
Instansi Penulis Kedua, Alamat, Kota dan Kodepos  
lolly\_39568@yahoo.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT / ABSTRAK

### Article history

Received:  
April 7, 2022

Revised:  
Juni 18, 2022

Accepted:  
Juni 30, 2022

Data kinerja irigasi nasional termasuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun 2017-2019 menunjukkan masih banyak yang masuk kategori kinerja jelek dan perlu perhatian segera. Kesenjangan antara indikator penilaian dan kinerja irigasi menunjukkan bahwa indikator yang digunakan selama ini masih belum memadai dalam menggambarkan kondisi empiris. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana sesungguhnya gambaran perhitungan penilaian indikator kinerja P3-TGAI dan indikator-indikator apa saja yang penting digunakan dalam perhitungan keberhasilan P3-TGAI. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis indikator yang selama ini digunakan serta mengembangkan indikator baru/tambahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif dengan melakukan kategorisasi dan sintesis dengan teori-teori yang digunakan seperti pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta mengacu pada syarat indikator yang SMART. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang selama ini digunakan yakni partisipasi dan jumlah tenaga kerja sangat terbatas untuk menggambarkan kinerja irigasi secara komprehensif. Penelitian ini berhasil mengembangkan indikator baru penilaian P3-TGAI yakni: (a) tingkat partisipasi anggota P3A/GP3A/IP3A dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, (b) tingkat transparansi pelaksanaan P3-TGAI, (c) Tingkat akuntabilitas pelaksanaan P3-TGAI, (d) tingkat aktivitas kelembagaan petani, (e) tingkat pengetahuan dan keterampilan petani, (f) tingkat layanan luasan irigasi, (g) tingkat pemenuhan air irigasi, (h) tingkat produksi hasil pertanian, (i) tingkat keberlanjutan P3-TGAI. Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan agar hasil pengembangan indikator-indikator tersebut dapat digunakan dalam melakukan penilaian keberhasilan P3-TGAI.

*However, the national irrigation performance data for The Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Use (P3-TGAI) from 2017 to 2019 shows that many irrigations areas are in poor performance category and need immediate attention. The gap between assessment indicators and irrigation performance shows that the indicators used are still inadequate in describing the empirical conditions. Therefore the problem in this study is how to describe the calculation of the success of the P3-TGAI performance indicators assessment and what indicators are important to use in calculating the success of P3-TGAI. For this reason, this study aims to identify and analyze the indicators that have been used and develop new/additional indicators. The research method used is descriptive-qualitative research method. Data were collected by primary data collection techniques through interviews and secondary data through library research. The data were analyzed descriptively by categorizing and synthesizing of theories used such as empowerment and community participation and referring to the SMART indicator requirements. The result of this study indicated that the indicators that have been used namely participation and the number of workers are very limited to describe irrigation performance comprehensively. This study succeeded in developing new indicators for the P3-TGAI assessment namely: (a) participation level farming community (P3A/GP3A/IP3A) in planning, implementation, and evaluation, (b) transparency level of P3-TGAI, (c) accountability level of P3-TGAI implementation, (d) farmer institutional activity level, (e) knowledge and skills level of farmers, (f) service level of irrigation area, (g) fulfillment level of irrigation water, (h) agricultural production rate, and (i) sustainability of P3-TGAI. From the results of this study, it can be recommended that the results of developing these indicators can be used in assessing the success of the P3-TGAI.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



**Keywords:** Indikator kinerja, irigasi, P3-TGAI, partisipasi, petani

**Kata Kunci:** Performance indicator, irrigation, P3-TGAI, participation, farmers

## 1. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sasaran strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024. Khusus sektor Sumber Daya Air, tujuan peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri, dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam. Adapun sasaran strategisnya adalah meningkatkannya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA (Renstra Kementerian PUPR 2020-2024).

Pada level operasional, tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator. Salah satu indikator yang diharapkan kinerjanya mengalami peningkatan adalah volume layanan air untuk peningkatan produktivitas irigasi. Adapun target kinerja dalam periode 2020 – 2024 ( $m^3/tahun/ha$ ) adalah (a) tahun 2020 sebesar 19,845 (b) tahun 2021 sebesar 20,554, (c) tahun 2022 sebesar 21,263, (d) tahun 2023 sebesar 21,971, dan (e) tahun 2024 sebesar 22,680 (Renstra Kementerian PUPR 2020-2024).

Hingga tahun 2019, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan jaringan irigasi untuk kewenangan Pusat yaitu (a) jaringan irigasi sepanjang 2.163,87 Km, (b) jaringan irigasi rawa 1.080,20 Km, (c) jaringan irigasi tambak 119,90 Km, dan (d) jaringan irigasi air tanah 295,80 Km. Adapun rehabilitasi telah dilakukan pada (a) jaringan irigasi sepanjang 6.329,95 Km, (b) jaringan irigasi rawa 5.139,62 Km, (c) jaringan irigasi tambak 764,83 Km, dan (d) jaringan irigasi air tanah 720,11 Km. Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan telah dilakukan pada (a) jaringan irigasi sepanjang 51,312 Km, (b) jaringan irigasi rawa 14.770 Km, dan (c) jaringan irigasi air tanah 478 Km.

Berbagai program telah dilakukan untuk mendorong agar kinerja irigasi mengalami peningkatan, termasuk dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, khususnya masyarakat petani pengguna air. Salah satu program tersebut adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional, mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan khususnya di kawasan perdesaan. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka mempercepat peningkatan tata guna air irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung aktivitas perekonomian, serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. P3-TGAI ini merupakan program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, disebutkan bahwa jenis kegiatan pelaksanaan P3-TGAI ini terdiri atas; Pertama, rehabilitasi jaringan irigasi (kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula). Kedua, peningkatan jaringan irigasi (kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi). Ketiga, pembangunan jaringan irigasi (kegiatan penyediaan jaringan di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya). Namun demikian, selain 3 jenis kegiatan di atas, P3-TGAI dapat berupa kegiatan normalisasi jaringan irigasi tanpa menggunakan alat berat.

Lokasi P3-TGAI meliputi: (a) jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi (D.I.) kewenangan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, dan (b) jaringan irigasi desa. Penentuan lokasi P3-TGAI berdasarkan (a) usulan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS), (b) usulan instansi pemerintah daerah, dan (c) usulan aspirasi masyarakat.

Selama pelaksanaan P3-TGAI, tidak dapat dipungkiri bahwa program tersebut telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari progres fisik secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 99,99% dengan capaian output 726 bangunan utama, 9.074 bangunan pelengkap, dan 3.794 km saluran. Adapun capaian *outcome* tahun 2021 adalah 459.517 Ha yang tersebar di 37 BBWS/BWS. Selain itu, melalui P3-TGAI, terdapat merata peningkatan indeks pertanaman (IP) dari 120,1% menjadi 170,2%.

Secara nasional, luasan areal sawah yang terdampak langsung oleh pelaksanaan kegiatan P3-TGAI pada tahun 2021 mencapai 459.517 Ha, di 11.999 Lokasi, atau rerata 38 Ha per lokasi kegiatan. Dengan rerata biaya sebesar Rp 5,2 Juta/Ha, kegiatan P3-TGAI cukup efisien dan efektif untuk mendorong target pencapaian luasan irigasi yang ditangani.

Dengan demikian, penilaian keberhasilan P3-TGAI perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selama ini penilaian indikator kinerja dalam pelaksanaan P3-TGAI menggunakan Surat Edaran Dirjen SDA No. 04/SE/D/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2021 yang hanya mencantumkan satu indikator. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, indikator kinerja P3-TGAI yang digunakan sebagai indikator keberhasilan, yakni: terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

petani dalam kegiatan teknis rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan jaringan irigasi perlu dikembangkan menjadi beberapa sub indikator tambahan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai efektivitas P3-TGAI antara lain Rusli, dkk (2021) yang mengkaji Efektivitas P3-TGAI di UPT Dinas PU, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kab. Tasikmalaya, Riski (2021) yang mengkaji Kajian Implementasi P3-TGAI di Kab. Dharmasraya, dan Saptono (2020) yang mengkaji Evaluasi P3-TGAI terhadap Kinerja Jaringan Irigasi di Kab. Bantul. Penelitian ini memberikan inovasi yang berbeda penelitian sebelumnya dalam hal mengembangkan indikator penilaian keberhasilan P3-TGAI dengan merumuskan beberapa sub indikator baru. Berdasarkan dinamika permasalahan di lapangan tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh terutama terkait dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana gambaran perhitungan /Penilaian berdasarkan indikator kinerja dalam Surat Edaran No. 04/SE/D/2021 terhadap tingkat keberhasilan P3-TGAI?; 2) Sub indikator apa saja yang perlu ditambahkan/dikembangkan untuk melengkapi indikator kinerja eksisting sesuai Surat Edaran No. 04/SE/D/2021?

## 2. Metodologi

Untuk melakukan kajian perumusan indikator penilaian kinerja P3-TGAI digunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk menggali data dan informasi sekaligus konsep yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan P3-TGAI melalui analisis deskriptif dengan melakukan kategorisasi serta sintesis dengan teori-teori yang digunakan.

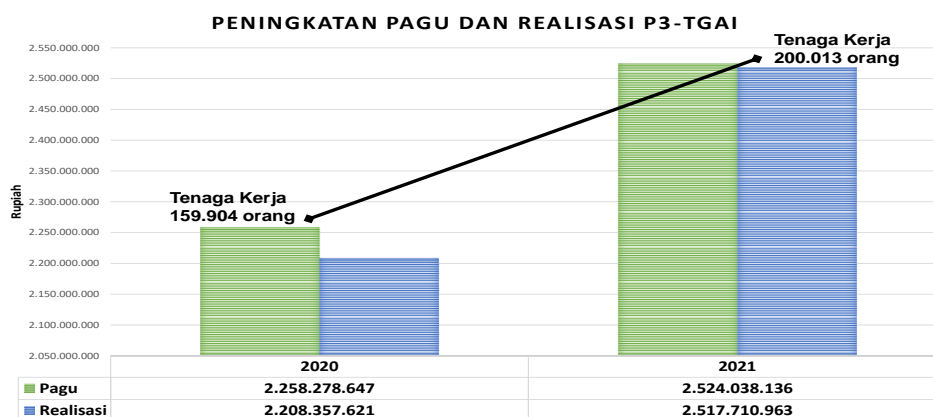
Untuk mendapatkan data, terhadap perhitungan tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan dilakukan dengan studi literatur (data sekunder) terutama pada laporan hasil kegiatan dan evaluasi P3-TGAI. Adapun data primer untuk merumuskan indikator baru dilakukan dengan wawancara kepada *stakeholder* terkait, meliputi:

- (a) Perwakilan Direktorat Bina OP, Ditjen SDA, Kementerian PUPR: Kasubdit Wilayah I, Subkoordinator Bimbingan Teknik dan Pemanfaatan SDA I Subdit Wilayah III, dan Subkoordinator Bimbingan Teknik dan Pemanfaatan SDA II Subdit Wilayah II.
- (b) Kasatker/PPK OP di Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, Ditjen SDA, antara lain: BBWS Citarum, BWS Sumatera V, BWS Sumatera VI Jambi, BWS Kalimantan V, BWS Sulawesi III, BWS Maluku, dan BWS Papua Barat.
- (c) Praktisi Irigasi/OP: Ir. Djito, SP.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perhitungan Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Surat Edaran Dirjen SDA No.04/SE/D/2021

Pemberdayaan dan partisipasi anggota P3-TGAI dapat dibuktikan dengan naiknya alokasi anggaran maupun realisasi P3-TGAI di tahun 2020 dan 2021. Begitu pula dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat dan jumlah hari orang kerja yang semakin meningkat di tahun 2021. Jumlah tenaga kerja P3-TGAI meningkat dari 159.904 orang di tahun 2020 menjadi 200.013 orang sedangkan jumlah hari orang kerja meningkat dari 7.473.420 hari di tahun 2020 menjadi 9.219.230 hari. Adapun rincian datanya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 1.** Peningkatan pagu dan jumlah tenaga kerja P3-TGAI

Pada tahap persiapan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/ Balai Wilayah Sungai (BWS) membentuk Tim Pelaksana Balai (TPB), Konsultan Manajemen Balai (KMB), Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) serta melakukan pelatihan dan sosialisasi di daerah irigasi penerima P3-TGAI. Selama ini perekrutan TPM memperhatikan keterlibatan perempuan sebesar 25%, rata-rata mendampingi 1-2 lokasi P3-TGAI, dan latar belakang pendidikan sarjana S1 teknik sipil. Dalam pelaksanaannya, TPM yang merupakan S2 teknik sipil sebesar 1,03% dan S1 teknik sipil sebesar 56,86%. Sementara itu, jumlah TPM yang tidak sesuai kualifikasi cukup banyak yaitu S1 non teknik sipil sebesar 42,40%, D3 teknik sipil sebesar 6,33%, dan D3 non teknik sipil/STM/SMK/SMA sebesar 4,38%.

Aspek-aspek lain juga perlu menjadi pertimbangan dalam mendukung keberhasilan P3-TGAI salah satunya TPM. Kualitas TPM perlu diperhatikan mengingat TPM berperan penting dalam mendampingi dan membantu masyarakat petani penerima P3-TGAI dalam melaksanakan pekerjaan. Perekrutan TPM yang sesuai kualifikasi dan telah mengikuti pembekalan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Menurut Praktisi Irigasi/OP: Ir. Djito, SP, TPM berperan penting dalam mendampingi masyarakat kelompok tani karena pengetahuan dan kemampuan mereka yang masih minim, bahkan beberapa dari mereka masih belum mengenal teknologi maupun sistem informasi. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Wilayah I, Dit. Bina OP maupun Kasatker OP di BBWS/BWS, kualitas TPM berbeda-beda menurut wilayahnya. Di Pulau Sumatera dan Jawa, sebagian besar kualitas TPM sudah baik dan memenuhi persyaratan saat rekrutmen. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kasatker OP di BWS Sumatera V yang menyatakan sebagian besar kualitas TPM sangat baik. Namun demikian kualitas TPM masih perlu ditingkatkan khususnya di wilayah timur antara lain Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menurut Kasatker OP di BWS Sulawesi III, ketersediaan sumber daya untuk TPM sangatlah kurang karena lulusan sarjana teknik sangat terbatas dan lebih memilih bekerja di kontraktor. Begitu pula menurut Kasatker OP BWS Maluku, hanya sekitar 50% TPM yang memiliki latar belakang pendidikan teknik, sisanya merupakan tenaga non teknik yang membutuhkan pelatihan secara khusus. Bahkan menurut Kasatker OP BWS Kalimantan V (Kalimantan Utara), peminat untuk menjadi TPM sangat sedikit sehingga sulit untuk menemukan TPM yang memenuhi persyaratan. Secara keseluruhan, rendahnya kualitas TPM disebabkan oleh: i) Terbatasnya lulusan sarjana teknik, ii) Kurangnya pengalaman di lapangan, iii) Kurangnya peminat untuk menjadi TPM, iv) Pelatihan kepada TPM terlalu singkat, v) Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada TPM.

P3-TGAI dilaksanakan sebagian besar oleh P3A yaitu sebesar 97,2% dan sisanya oleh GP3A sebesar 2,7% dan IP3A sebesar 0,1%. Adapun jumlah lokasi P3-TGAI terus mengalami peningkatan dan terjadi kecenderungan semakin banyak setiap desa menerima lebih dari satu lokasi penerima P3-TGAI. Pada tahun 2021, jumlah lokasinya bertambah dari awalnya 10.000 menjadi 12.000 melalui revisi kedua yang ditetapkan di dalam Kepmen. PUPR No. 776/KPTS/M/2021 dengan sebaran tertinggi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sedangkan sebaran terendah adalah di Provinsi Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Lokasi P3-TGAI sebagian besar berada di D.I. kewenangan desa yaitu sebesar 41,4%. Jenis kegiatan utama P3-TGAI adalah rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi pada saluran tersier atau pada saluran utama/primer atau sekunder pada daerah irigasi desa. Sebagian besar P3-TGAI dilaksanakan pada jaringan irigasi tersier, yaitu sebanyak 97,07 %, dan sisanya pada jaringan utama, sekunder dan pembuang. Adapun P3-TGAI 88,5% dilaksanakan pada irigasi permukaan, 5,8% pada irigasi rawa, 3,5% pada irigasi air tanah, 2% pada irigasi pompa, dan 0,1% pada irigasi tambak.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan P3-TGAI juga diukur dari indikator meningkatnya kondisi jaringan irigasi yang diukur dari progres fisik yang sebagian besar tercapai yaitu 100%. Dari Laporan Akhir "Tim Teknis Pusat" Tahun Anggaran 2021, diperoleh hasil bahwa jaringan irigasi yang terbangun dan direhabilitasi adalah sebagian besar pada saluran tersier yaitu sepanjang 3.470.874 meter sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1.** Rincian output fisik kegiatan P3-TGAI tahun 2021

Jenis bangunan dan saluran		Volume	
Bangunan	Bendung (bh)	726 buah	
		9.074 buah	
	Bangunan pelengkap	4.933 meter	
Saluran	Induk	Pasangan	218 m <sup>2</sup>
		Tanah	13.470 meter
	Sekunder	Pasangan	8.561 meter
		Tanah	11.805 meter
	Tersier	Pasangan	12.709 meter
		Tanah	3.470.874 meter
	Pembuang	Pasangan	1.551.090 meter
		Tanah	15.123 meter
	Saluran lain-lain		314.563 meter
			283.722 meter

### 3.2. Review terhadap Indikator Kinerja Eksisting

Pemberdayaan dan partisipasi anggota P3A/GP3A/IP3A selama ini hanya diukur pada tahap persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan sedangkan tahap evaluasi tidak dilakukan dengan melibatkan P3A/GP3A/IP3A. Tahap evaluasi perlu dilakukan secara berkala baik secara bulanan untuk merumuskan tindak lanjut penyelesaian kegiatan maupun secara tahunan untuk memberikan *feedback* pelaksanaan tahun selanjutnya. Seharusnya anggota P3A/GP3A/IP3A selaku pelaksana kegiatan atau pihak yang paling paham kondisi di lapangan juga terlibat di dalam tahapan evaluasi yang dilakukan oleh BBWS/BWS.

Selain itu, materi masukan PP tentang Irigasi sebagai pengganti PP Nomor 20 Tahun 2006, target kegiatan pemberdayaan P3A adalah P3A dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi secara mandiri pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut diterapkan pula pada pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A untuk P3-TGAI. Namun demikian, pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A tentunya dipengaruhi oleh kualitas pendampingan yang dilaksanakan oleh TPM. Untuk itu, pada indikator pemberdayaan tersebut diperlukan sub indikator kapasitas TPM yang dapat diukur dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh TPB. Sosialisasi diukur tidak hanya dari kuantitas pelaksanaannya namun juga substansi terkait bagaimana melakukan pendampingan di lapangan. Metode sosialisasi perlu ditingkatkan ke target pemahaman dan kemampuan tugas-tugas operasional TPM di lapangan. Hal ini merupakan solusi atas TPM yang kurang sesuai dengan kriteria.

Pelaksanaan P3-TGAI tidak hanya dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, pemerataan, dan akuntabilitas, namun juga memenuhi prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, prinsip tersebut perlu digunakan sebagai rumusan indikator kinerja dalam menilai keberhasilan pelaksanaan P3-TGAI. Dari salah satu prinsip tersebut, aspek transparansi sangat penting untuk dinilai, mengingat total anggaran P3-TGAI sangat besar setiap tahunnya yaitu mencapai Rp 2,5 Triliun di tahun 2021.

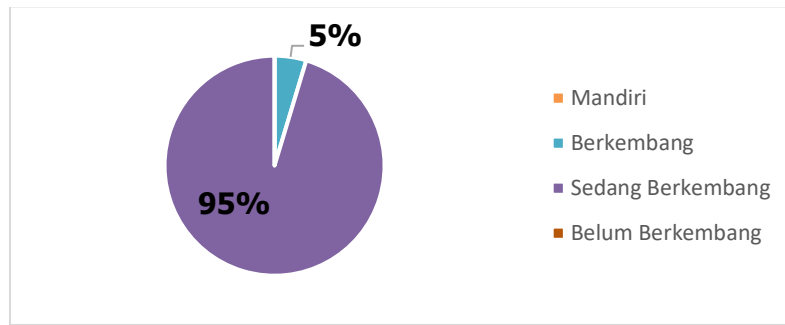
Transparansi pelaksanaan P3-TGAI perlu dijadikan suatu indikator kinerja untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran P3-TGAI. Berdasarkan hasil survei yang tercantum di dalam *Policy Brief* dengan judul "Penguatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Program Padat Karya Tunai (PKT) Infrastruktur PUPR", transparansi dalam penggunaan anggaran kegiatan PKT termasuk di dalamnya P3-TGAI masih lemah. Dari hasil survei dapat dilihat bahwa presensi tenaga kerja, dokumentasi progres kegiatan, pembayaran upah pegawai, dan arsip data tenaga kerja belum tersistem dengan baik sehingga aspek transparansinya masih perlu ditingkatkan.

Aspek akuntabilitas perlu menjadi salah satu indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan P3-TGAI. Dari hasil diskusi dan pengamatan di lapangan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan P3-TGAI masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan akuntabilitasnya karena beberapa pertanggungjawaban kegiatan maupun anggaran masih dipertanyakan kebenarannya. Dalam beberapa pekerjaan di Jawa Timur, kegiatan P3-TGAI tidak dilakukan oleh masyarakat kelompok tani tetapi malah diserahkan kepada kontraktor atau diborongkan (sesuai Berita di Nusantara Pos tahun 2020 dan Lintas One tahun 2021).

Kelembagaan petani menjadi suatu aspek yang perlu diperhitungkan sebagai indikator kinerja untuk menilai keberhasilan P3-TGAI. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A Pasal 17 Ayat (3) disebutkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui penguatan yang meliputi: a) pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya; b) kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan c) kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain. PUPR baru menyentuh aspek pada butir a dan sebagian butir b. Kementerian Pertanian lebih fokus pada materi teknis budidaya tanaman (sebagian butir b). Adapun untuk aspek finansial (butir c) belum/ tidak ada instansi pemerintah yang mengintervensi atau melaksanakan pemberdayaan P3A dan bertanggung dalam aspek finansial atau pembiayaan.

Kelembagaan petani yang dimaksud pada butir a tersebut di atas dapat dilihat dari peningkatan jumlah P3A/GP3A/IP3A yang memiliki legalitas dengan akta notaris dari 95,2% di tahun 2020 menjadi 98,5% di tahun 2021 serta tidak ada lagi P3A/GP3A/IP3A yang hanya menggunakan SK Kepala Desa. Ke depannya, pengukuran tingkat kelembagaan petani dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas kemandirian P3A dan mensinergikan dengan kelembagaan petani lainnya tidak hanya melihat dari aspek legalitasnya.

Dalam mengukur kelembagaan petani, aspek pembinaan agar P3A/GP3A/IP3A melakukan pekerjaan secara akuntabel juga perlu dipertimbangkan, mengingat dalam kasus beberapa pekerjaan di Jawa Timur yang mana pekerjaan justru diborongkan. P3A/GP3A/IP3A yang berkembang atau mandiri seharusnya tidak akan bermental sebagai "pemborong" namun harus mampu membuat P3-TGAI sebagai kegiatan berkelanjutan.



**Gambar 2.** Rekapitulasi kategori P3A operasional tahun 2021

Sumber: Laporan monitoring DLI-6: berfungsi P3A/GP3A/IP3A tahun 2018-2021

Pemahaman petani terhadap P3-TGAI sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan pandangan Hanafi (2019) bahwa salah satu faktor penghambat keberhasilan suatu pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi pembangunan. Anggraini dkk. (2019) menyebutnya sebagai pengetahuan bahwa tingkat pengetahuan petani sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program.

Salah satu *outcome* yang penting perlu dirumuskan sebagai indikator kinerja dalam menilai pelaksanaan P3-TGAI adalah dampak terhadap layanan irigasi yang diukur melalui luasan areal sawah dengan adanya rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sesuai dengan Laporan Akhir “Tim Teknis Pusat” Tahun Anggaran 2021, *outcome* P3-TGAI yang dihasilkan adalah seluas 459.517 Ha dengan total capaian *outcome* dari tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar 1,9 juta Ha. Dengan *outcome* tersebut, maka terlihat bahwa P3-TGAI memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan layanan luasan irigasi tidak hanya menghasilkan output fisik pembangunan.

Selain itu, *outcome* yang juga penting untuk diukur adalah tingkat pemenuhan air irigasi. Melalui P3-TGAI, kebutuhan air untuk pertanian dapat terpenuhi dan permasalahan kekurangan air saat kemarau dapat teratasi. Namun selama ini, P3A/ GP3A/ IP3A maupun balai setempat tidak pernah memiliki data mengenai tingkat pemenuhan kebutuhan air sehingga pada saat evaluasi program dan kegiatan, kebutuhan air tidak dapat terpetakan apakah sudah tercukupi. Seharusnya indikator tersebut dapat menjadi acuan dalam penentuan P3-TGAI tahun-tahun selanjutnya.

P3-TGAI bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian namun selama ini, berdasarkan hasil diskusi dengan balai, data tersebut tidak tersedia. Kelompok P3A/GP3A/IP3A selaku pelaksana juga kesulitan untuk menghitung dampak pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi terhadap peningkatan produktivitas hasil pertanian (ton/Ha padi). Selama ini jaringan irigasi yang dibangun melalui skema P3-TGAI adalah jaringan tersier sementara untuk mengairi luas areal sawah juga terdapat kontribusi dari jaringan irigasi primer dan sekunder. Untuk itu, indikator tingkat produktivitas hasil pertanian perlu dimasukkan sebagai indikator kinerja keberhasilan P3-TGAI sehingga terdapat cara pengukuran yang seragam. Pembobotan dapat dilakukan sebagai salah satu formulasi pengukuran yang mana akan menghitung kontribusi pembangunan jaringan irigasi tersier terhadap produktivitas hasil pertanian dari luasan areal sawah tertentu.

Indikator-indikator seperti *outcome* pemenuhan kebutuhan air dan peningkatan hasil produksi pertanian juga sangat penting diperhatikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hagang dkk. (2019) bahwa salah satu faktor pendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa apa yang dilaksanakan membawa perubahan bagi masyarakat. Hal ini sangat relevan bahwa pemenuhan kebutuhan air dan peningkatan produksi hasil tanaman merupakan perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatker OP di BBWS/BWS, faktor keberhasilan P3-TGAI ditentukan oleh pemilihan lokasi yang sesuai kriteria, kualitas TPM maupun KMB, keaktifan dan kemampuan P3A/ GP3A/ IP3A dalam melaksanakan P3-TGAI, perumusan Petunjuk Teknis (Juknis) yang memadai, dan keseriusan pemerintah dalam mendorong P3-TGAI. Menurut Kasatker OP di BWS Maluku, pemilihan lokasi menjadi faktor utama penentu utama keberhasilan karena di lokasi yang sesuai maka seharusnya ada penggarap (dalam hal ini kelompok P3A/ GP3A/ IP3A) dan terdapat jaringan irigasi yang mendukung produktivitas pertanian. Begitu pula yang disampaikan Kasatker OP di BBWS Citarum bahwa faktor keberhasilan ditentukan oleh pemilihan lokasi yang tepat serta kerja sama yang baik oleh TPM, KMB, dan Tim Balai. Adapun menurut Kasatker OP di BWS Sumatera V, peran P3A/ GP3A/ IP3A sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan karena untuk mewujudkan keberlanjutan P3-TGAI, diperlukan tidak hanya partisipasi P3A/ GP3A/ IP3A tetapi juga rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan dari P3-TGAI yang telah dilaksanakan.

Adapun untuk faktor penghambat P3-TGAI, sebagian besar Kasatker OP di BBWS/BWS berpendapat bahwa terdapat oknum-oknum yang terkadang melakukan intervensi dalam pemilihan lokasi agar P3-TGAI dilaksanakan di lokasi sesuai preferensi mereka namun tidak sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan di dalam Juknis. Faktor lainnya yang menghambat P3-TGAI adalah adanya alih fungsi lahan pertanian dan intervensi oknum tertentu agar P3-TGAI dilakukan secara kontraktual. Menurut Kasatker OP di BBWS Citarum, dalam menangani hambatan tersebut, TPM dan KMB diberdayakan untuk membantu terkait hambatan-hambatan teknis di lapangan sedangkan untuk non teknis, pihak BBWS Citarum melibatkan aparat penegak hukum setempat. Hal tersebut terbukti efektif yaitu dilihat dari jumlah pengaduan kegiatan P3-TGAI yang semakin berkurang.

### 3.3. Rumusan Indikator yang Penting dalam Perhitungan Keberhasilan Pelaksanaan P3-TGAI

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut di atas, indikator penilaian keberhasilan P3-TGAI eksisting berdasarkan SE Dirjen SDA No. 04/SE/D/2021 perlu dikembangkan menjadi beberapa sub indikator berdasarkan analisis data serta sintesis teori-teori. Pengembangan sub indikator dilakukan dengan menggunakan metode SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sebagai berikut:

**Tabel 2.** Komparasi antara indikator SE Np.04/SE/D2021 dan rumusan indikator kinerja yang baru

Indikator Penilaian Berdasarkan SE Dirjen SDA No. 04/SE/D/2021			Temuan dan Rumusan Indikator Kinerja yang Baru	
No	Indikator/Sub Indikator	Cara Pengukuran	Indikator/Sub Indikator	Cara Pengukuran
A.	Indikator Kinerja Eksisting: Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Petani dalam Kegiatan Teknis: Rehabilitasi Jaringan, Peningkatan Jaringan Irigasi, dan Pembangunan Jaringan Irigasi			
	Usulan Sub Indikator:			Usulan Sub Indikator:
1.	Tingkat Partisipasi Anggota P3A/GP3A/IP3A dalam: a) Perencanaan; b) Pelaksanaan; dan c) Evaluasi.	Persentase jumlah pekerja di dalam suatu P3A/GP3A/IP3A yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi P3-TGAI dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah pekerja. <i>(Catatan: Evaluasi tidak dilakukan dengan melibatkan P3A/GP3A/IP3A)</i>	Tingkat Partisipasi Anggota P3A/ GP3A/ IP3A dalam: a) Perencanaan; b) Pelaksanaan; dan c) Evaluasi.	Persentase jumlah pekerja di dalam suatu P3A/GP3A/IP3A yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi P3-TGAI dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah pekerja.  Evaluasi dilakukan juga secara partisipatif dengan melibatkan P3A/GP3A/IP3A  Indikator ini dapat diukur oleh TPM dan dikumpulkan oleh KMB untuk kemudian disampaikan dan direkapitulasi oleh Tim BBWS/BWS.
2.	-	-	Tingkat Transparansi Pelaksanaan P3-TGAI	Pengukuran dengan survei tentang sistem informasi P3-TGAI antara lain terkait jumlah pekerja, presensi tenaga kerja, upah tenaga kerja, bukti pembayaran tenaga kerja, dll. Indikator ini dapat diukur oleh TPM dan dikumpulkan oleh KMB, serta disampaikan dan direkapitulasi oleh Tim BBWS/BWS.
3.	-	-	Tingkat Akuntabilitas Pelaksanaan P3-TGAI: a) Ketepatan Sasaran; b) Ketepatan Waktu; c) Ketepatan Pembiayaan; dan d) Mutu Pekerja.	Pengukuran dengan survei/kuisisioner yang mencakup ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan mutu pekerjaan P3-TGAI. Indikator ini dapat diukur oleh TPM dan dikumpulkan oleh KMB untuk kemudian disampaikan dan direkapitulasi oleh Tim BBWS/BWS.

Indikator Penilaian Berdasarkan SE Dirjen SDA No. 04/SE/D/2021			Temuan dan Rumusan Indikator Kinerja yang Baru	
No	Indikator/Sub Indikator	Cara Pengukuran	Indikator/Sub Indikator	Cara Pengukuran
4.	-	-	Tingkat Aktivitas Kelembagaan Petani	Indikator Tingkat Aktivitas Kelembagaan Petani menggunakan penilaian kategori yang telah dilakukan dengan menggunakan kriteria Direktorat Bina O&P sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Berkembang (BB) nilai : &lt; 22.50</li> <li>- Sedang Berkembang (SB) nilai : 22.51 - 55.82</li> <li>- Berkembang (B) nilai : 55.83 - 89.16</li> <li>- Mandiri (M) nilai : 89.17 - 100</li> </ul> Untuk penilaian kinerja P3A yang operasional dilakukan pembobotan pada 4 indikator (Petunjuk penilaian kinerja P3A. Dit Bina O&P) yaitu: Kelembagaan 35 %, Teknik Irigasi 40 %, Teknik Pertanian 12.5%, Pembiayaan 12.5%
5.	-	-	Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Petani	Pengukuran melalui kuesioner sederhana kepada masyarakat petani setelah dilaksanakannya sosialisasi oleh TPM. Indikator ini dapat diukur oleh TPM dan dikumpulkan oleh KMB untuk kemudian disampaikan dan direkapitulasi oleh Tim BBWS/BWS. Namun perlu menjadi catatan bahwa TPM harus menilai secara objektif karena selama ini beberapa penyusunan laporan P3A/GP3A/IP3A bahkan dikerjakan oleh TPM sehingga P3A/GP3A/IP3A tidak belajar dari kegiatan tersebut.
<b>B. Indikator Kinerja Eksisting: Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi</b>				
Usulan Sub Indikator:			Usulan Sub Indikator:	
6.	-	-	Tingkat Layanan Luasan Irigasi	Indikator Tingkat Layanan Luasan Irigasi diperoleh dari <i>outcome</i> kegiatan P3-TGAI atau dampak terhadap areal sawah dengan adanya rehabilitasi, peningkatan dan/atau pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A. Indikator ini agar menjadi aspek utama yang harus dicantumkan dalam Laporan KMB dan direkapitulasi oleh Tim BBWS/BWS.
7.	-	-	Tingkat Pemenuhan Air Irigasi	Indikator Tingkat Pemenuhan Air Irigasi diukur melalui persentase kebutuhan air irigasi dibandingkan dengan ketersediaan air irigasi. Data ini diperoleh melalui pengukuran di

Indikator Penilaian Berdasarkan SE Dirjen SDA No. 04/SE/D/2021			Temuan dan Rumusan Indikator Kinerja yang Baru	
No	Indikator/Sub Indikator	Cara Pengukuran	Indikator/Sub Indikator	Cara Pengukuran
				lapangan yang dilakukan oleh Tim BBWS/BWS.
8.	-	-	Tingkat Produksi Hasil Pertanian	Indikator Tingkat Produksi Hasil Pertanian diukur melalui pembobotan terhadap produksi hasil pertanian secara keseluruhan (ton/Ha padi). Data ini diperoleh melalui pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh Tim BBWS/BWS.
9.	-	-	Tingkat Keberlanjutan P3-TGAI	Indikator ini dapat diukur melalui pembobotan dan kuesioner yang meliputi aspek: 1) Proses pengusulan P3-TGAI (apakah sudah berdasarkan usulan P3A/GP3A/IP3A), 2) Kegiatan P3-TGAI tahun selanjutnya dilaksanakan dengan mengutamakan P3A/GP3A/IP3A yang sudah ada, 3) Keberlanjutan jaringan irigasi yang telah terbangun, 4) Keberlanjutan pembinaan atau pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

## 4. Kesimpulan & Saran

### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perhitungan/penilaian berdasarkan indikator kinerja eksisting dalam Surat Edaran No. 04/SE/D/2021 terhadap tingkat keberhasilan P3-TGAI yaitu terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dan peningkatan kondisi jaringan irigasi dirasa perlu dikembangkan menjadi beberapa sub indikator agar dapat menilai kinerja keberhasilan P3-TGAI secara lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk masa mendatang.

Berdasarkan hasil *review* dan dengan menggunakan metode SMART, (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), maka dirumuskanlah beberapa usulan sub indikator yang perlu ditambahkan/dikembangkan untuk melengkapi indikator kinerja eksisting sesuai Surat Edaran No. 04/SE/D/2021, meliputi:

- a. Indikator Kinerja Eksisting: Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Petani dalam Kegiatan Teknis: Rehabilitasi Jaringan, Peningkatan Jaringan Irigasi, dan Pembangunan Jaringan Irigasi, dengan **usulan sub indikator**:
  - 1) Tingkat partisipasi anggota P3A/GP3A/IP3A dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
  - 2) Tingkat transparansi pelaksanaan P3-TGAI.
  - 3) Tingkat akuntabilitas pelaksanaan P3-TGAI.
  - 4) Tingkat aktivitas kelembagaan petani.
  - 5) Tingkat pengetahuan dan keterampilan petani.
- b. Indikator Kinerja Eksisting: Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi, dengan **usulan sub indikator**:
  - 1) Tingkat layanan luasan irigasi.
  - 2) Tingkat pemenuhan air irigasi.
  - 3) Tingkat produksi hasil pertanian.
  - 4) Tingkat keberlanjutan P3-TGAI.

Dengan adanya pengembangan sub indikator tersebut untuk melengkapi indikator eksisting yaitu terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan teknis rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi, dan/atau pembangunan jaringan irigasi, maka diharapkan pelaksanaan P3-TGAI dapat lebih terukur, lebih akuntabel, dan lebih berkelanjutan ke depannya.

## 4.2. Rekomendasi

Bab Rekomendasi adalah opsional. Sebagian besar paper ilmiah bidang ilmu pasti (alam) biasanya tidak memiliki Bab Rekomendasi, kecuali jika diperlukan. Bab Rekomendasi biasanya lebih sering dijumpai pada paper-paper yang terkait dengan topik kebijakan publik. Layaknya sebuah alinea, Ucapan terimakasih setidaknya terdiri dari 2 (dua) kalimat.

### Ucapan Terimakasih

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan selain pengembangan sub indikator kinerja penilaian P3-TGAI di atas, antara lain:

1. Rekomendasi untuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/ Balai Wilayah Sungai (BWS): Penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) melalui perekrutan yang sesuai kompetensi dan cara pembekalan substansi yang efektif;
2. Rekomendasi untuk KMP maupun KMB dibawah supervisi Tim BBWS/BWS: Penyeragaman format laporan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) maupun Balai (KMB) yang memuat capaian seluruh sub indikator; dan
3. Rekomendasi untuk Direktorat Bina OP: mengembangkan pembinaan yg lebih intensif dan efektif untuk mendapatkan metode/ model pendekatan pelaksanaan P3-TGAI murni berbasis partisipatif (tidak menghasilkan kelompok P3A/GP3A/IP3A dengan mental “pemborong/ kontraktor”).
4. Rekomendasi untuk Direktorat Bina OP: mensosialisasikan materi terkait sub indikator dalam penilaian keberhasilan P3-TGAI ketika bimbingan teknis bersama TPM dan KMB.
5. Rekomendasi untuk BPSDM: dapat menjadikan materi terkait sub indikator dalam penilaian keberhasilan P3-TGAI ketika pelatihan Operasi & Pemeliharaan Irigasi Tingkat Pengamat/Juru dilaksanakan sebagai materi tambahan untuk strategi peningkatan kinerja pemeliharaan irigasi.

### Daftar Referensi

- Adi, R. I. (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UII.
- Adiarsi, A. (2020). Partisipasi Petani dalam Program Kluster Pertanian Modern di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. *Agritexts: Journal Agricultural Extension*. 44 (1). 2020.
- Anggraini, dkk. 2019. “Partisipasi Petani dan Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan” Dalam *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis (JIIA) Universitas Lampung*. Vol. 7 No. 1 Februari 2019.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BBWS Bengawan Solo. 2020. “Keberhasilan P3-TGAI Tahun 2020 di Wilayah Hulu” Dalam <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php/2020/11/25/keberhasilan-p3tgai-tahun-2020-di-wilayah-hulu/>.
- Bryman, A. (2004). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. (2021). *Penerapan Optimalisasi Pemeliharaan, Operasi dan Pemeliharaan pada Infrastruktur SDA*.
- Hagang V.A.A. (2019). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7 (2): 529-530.
- Hanafi. (2019). *Analisis Tingkat Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara*. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan.
- Hermawati, W. (2007). *Indikator Sensitif Gender: Arti Penting dan Berbagai Contohnya dalam Program Pembangunan IPTEK*.
- Ife, J. (1996). *Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*. Longman.
- Isyaturriyadhah. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Gabungan Kelompok Tani Tanjung Sehati dalam Kegiatan Kelompok di Kabupaten Merangin. Dalam [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_832341415396.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_832341415396.pdf).
- Laporan Akhir “Tim Teknis Pusat” Tahun Anggaran 2021 Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Laporan Monitoring DLI-6: berfungsinya P3A/GP3A/IP3A Tahun 2018-2021 Pelaksanaan Program IPDMIP NPIU Bina OP Wilayah Timur.

- Lintas One. (2021). "Tidak Tepat Sasaran, Diduga P3-TGAI Tahap II Digagahi Oknum Pemborong" dalam <https://nusantarapositionline.com/proyek-irigasi-p3tgai-padat-karya-didesa-jatigedong-jombang-malah-dikerjakan-pemborong/>
- Nusantara Pos. (2020). "Proyek Irigasi P3-TGAI Padat Karya, di Desa Jatigedong Jombang Malah Dikerjakan Pemborong?" dalam <https://www.lintasone.com/2021/09/tidak-tepat-sasaran-diduga-p3-tgai.html>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.
- Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.
- Poerwati, T. & Annisaa, H.I. (2019). Keberhasilan Pembangunan Desa Ditinjau dari Bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. *Jurnal Arsitektur*. Vol 3. No. 02 Juli – Desember 2019.
- Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kementerian PUPR. (2021). Policy Brief: Penguatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Program Padat Karya Tunai (PKT) Infrastruktur PUPR.
- Riski, N. F. (2021). Kajian Implementasi dalam Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Dharmasraya. Diploma Thesis, Universitas Bung Hatta.
- Rusli, Damay. (2021). Efektivitas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di UPT Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Wilayah Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Publikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya.
- Saptono, T. J. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Terhadap Kinerja Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul. Publikasi Universitas Islam Indonesia.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparjan & Hempri. (2003). Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 134/SE/D/2017 tentang Petunjuk Teknis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2018.
- Suroso, H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Wacana*. Vol. 17. No. 1. 2014.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]